

DISASTER MANAGEMENT COMMUNICATION MODEL

MODEL KOMUNIKASI PENANGGULANGAN BENCANA

Muhammad Hilmy Aziz^{1*}

¹Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bhayangkara Surabaya

*hilmy@ubhara.ac.id

Article Informations

Keywords:

*Communication Role Model,
Disaster Management, Updating
the Disaster Paradigm*

ABSTRACT

Indonesia is located where the four main plates of the world meet, namely Eurasia, Indo-Australia, the Philippines, and the Pacific, which geologically makes Indonesia prone to earthquakes, tsunamis, and volcanic eruptions. This research provides a concrete picture of the latest communication models in disaster management studies that have been carried out still within the risk reduction paradigm. Preparing this communication model is expected to provide strategic potential as an effort and step where Indonesia can make organized disaster management at the communication level. This research uses a qualitative method which can give a concrete picture of how to handle disasters. In addition, FGD (Focus Group Discussion) is a way of collecting data through direct discussion and analyzing problems with experts. The research focuses on more than just the communication model as an essential part of disaster management. The development of literacy as a role model can be applied to form a sophisticated handling of disasters that integrates technology with society and media independence in presenting the information. Through these steps, disaster management can be realized in the communication corridor used to provide a new paradigm related to disaster management.

Informasi Artikel

Kata Kunci:

**Model Peran Komunikasi,
Penanggulangan Bencana,
Pembaruan Paradigma Bencana**

ABSTRAK

Indonesia terletak pada pertemuan empat lempeng utama dunia, yaitu Eurasia, Indo-Australia, Filipina, dan Pasifik, yang secara geologis membuat Indonesia rawan terhadap gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Penelitian ini memberikan gambaran konkrit mengenai model komunikasi terkini dalam kajian penanggulangan bencana yang selama ini dilakukan masih dalam paradigma pengurangan risiko. Penyusunan model komunikasi ini diharapkan dapat memberikan potensi strategis sebagai upaya dan langkah dimana Indonesia dapat melakukan penanggulangan bencana yang terorganisir pada level komunikasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dapat memberikan gambaran konkrit tentang bagaimana penanganan bencana. Selain itu, FGD (Focus Group Discussion) adalah cara pengumpulan data melalui diskusi langsung dan menganalisis masalah dengan para ahli. Penelitian ini berfokus pada lebih dari sekedar model komunikasi sebagai bagian penting dalam penanggulangan bencana. Pengembangan literasi sebagai role model dapat diterapkan untuk membentuk penanganan bencana yang canggih yang mengintegrasikan teknologi dengan masyarakat dan independensi media dalam menyajikan informasi. Melalui langkah-langkah tersebut, penanganan bencana dapat diwujudkan dalam koridor komunikasi yang digunakan untuk memberikan paradigma baru terkait penanganan bencana.

Submisi 30/07/2023

Diterima 14/12/2023

Dipublikasikan 26/12/2023

DOI <https://doi.org/10.22487/ejk.v10i3.932>

PENDAHULUAN

Berbicara tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak bisa dipisahkan dengan adanya rawan bencana yang secara keseluruhan wilayah Indonesia berpotensi terjadinya bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

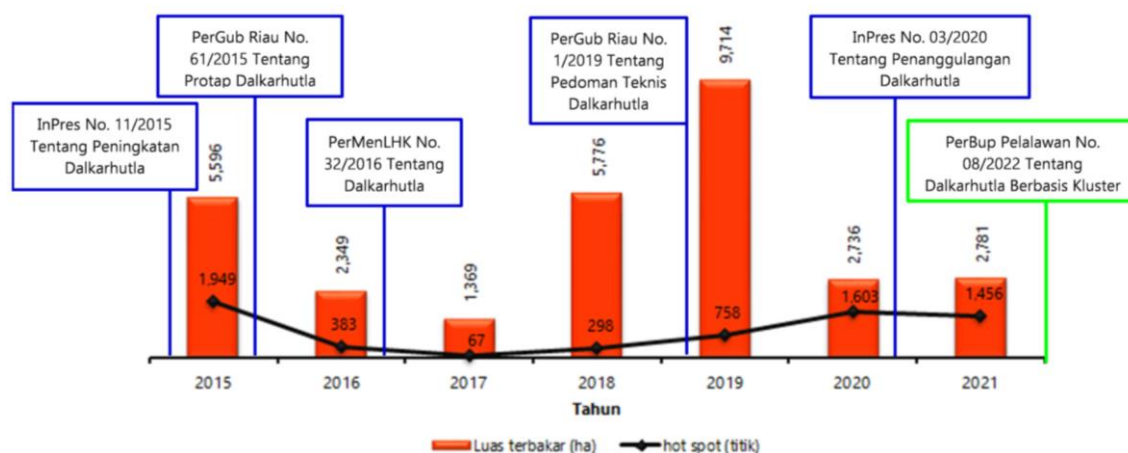
mencatat sebanyak 749 peristiwa bencana alam di Indonesia sejak 1 Januari hingga 31 Maret 2023. Dari jumlah tersebut, banjir bencana yang paling banyak terjadi dengan total 331 kejadian. Jumlah ini setara 44,19% dari total kejadian bencana nasional pada periode tahun 2023. Selain itu, BNPB juga mencatat sebanyak 226 peristiwa cuaca ekstrem, 130 tanah longsor, 41 kebakaran hutan dan lahan (karhutla), 10 gelombang pasang/abrasi, 9 gempa bumi, dan 2 erupsi gunung api (Annur, 2023). Berdasarkan catatan lain yang disoroti oleh Geoportal – Badan Nasional Penanggulangan Bencana menemukan jumlah yang sangat luar biasa terkait terjadinya peristiwa bencana alam di Indonesia dalam 1 dekade terakhir dari mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2022. Melalui tabel yang dipaparkan di bawah ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai “*ring of fire*” benar adanya dan merupakan hal terpenting yang harus menjadi perhatian bersama dalam proses mitigasi bencana (Geoportal Data Bencana Indonesia, 2023).

Tabel 1. Jumlah Bencana di Indonesia Tahun 2012-2022

Tahun	Jumlah Bencana
2012	1.780
2013	1.666
2014	1.961
2015	1.694
2016	2.306
2017	2.866
2018	3.397
2019	3.814
2020	4.650
2021	5.402
2022	3.544

Sumber: Geoportal Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) (Infografis Tahunan Bencana di Indonesia)

Melihat pada tabel 1 di atas, peristiwa bencana yang terjadi di Indonesia secara keseluruhan menunjukkan terdapat signifikansi kenaikan selama periode 1 dekade terakhir. Rangkuman yang telah disajikan dalam tabel tersebut memberikan suatu sinyal bahwa suatu peristiwa bencana sangat besar potensi terjadi dan tidak bisa terprediksi sebelumnya walaupun secara teknis sudah dilakukan banyak perubahan maupun upaya untuk bisa mereduksi terjadinya peristiwa bencana. Firman Wahyudi memberikan catatan penting melalui hasil penelitiannya terkait pola komunikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, yakni dalam mencegah bencana asap BPBD Riau yaitu pola roda. Pola roda yang digunakan BPBD Riau saat melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Badan Lingkungan Hidup (BLH). Pola roda juga digunakan saat tanggap darurat, bahwa ada pimpinan yang memberi perintah dan arahan yang jelas dalam proses penyampaian pesannya (Wahyudi, 2016). Catatan tersebut memberikan gambaran dimana instansi yang fokus dalam menangani maupun membuat suatu penanggulangan melakukan aktifitasnya dalam rangka mitigasi bencana khususnya penanganan bencana asap atau yang dalam ini ada peristiwa kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Fakta ini kontra produktif dengan ditemukannya data grafik yang menyoroti besaran lahan maupun hutan yang terbakar pada periode tujuh tahun terakhir yaitu terhitung dari 2015-2021.



Gambar 2. Data luas kebakaran dan jumlah hot spot di Provinsi Riau tahun 2015 – 2022 dan regulasi pengendalian karhutla
Sumber : Sutrisno & Hardhinasty, 2019

Data yang ditunjukkan melalui diagram batang maupun grafik menunjukkan ketidakmampuan penanggulangan kebakaran hutan yang menyebabkan peristiwa bencana asap. Angka yang paling signifikan terjadi pada tahun 2019 yakni seluas 9,714 ha kebaran hutan yang diakibatkan oleh 758 titik hot spot yang menjadi pemicu kebakaran hutan. Lebih lanjut dalam hasil penelitian yang lakukan oleh Afni, dkk menyoroti mengenai paradigma kebijakan perlindungan tata kelola gambut di Indonesia yang mengalami perubahan krusial pasca kejadian kebakaran hutan dan lahan tahun 2015. Pemerintah tidak hanya melakukan berbagai langkah koreksi kebijakan (*corrective policy*), tapi juga melakukan koreksi aksi kerja lapangan (*corrective action*) perlindungan ekosistem gambut sebagai upaya pengendalian karhutla dengan mengedepankan upaya pencegahan dan penegakan hukum. Selain itu jika sebelum tahun 2015 pemanfaatan gambut lebih dominan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, maka setelahnya orientasi kebijakan lebih mengarah pada pemanfaatan gambut berkelanjutan (Afni, Dkk, 2022).

Pencegahan maupun penanggulangan bencana pada umumnya terpusat dilakukan oleh dinas maupun pihak terkait yang berkompen dibidangnya. Alhasil bahwa pengulangan hanya bisa dilakukan ketika dari pihak yang berwenang melakukan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mitigasi bencana. Pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana memberikan informasi khusus tentang pengurangan risiko bencana. Lebih lanjut dalam peraturan pemerintah juga menjelaskan bahwa mitigasi merupakan rangkaian upaya pengurangan risiko bencana melalui pembangunan fisik dan peningkatan kesadaran serta kemampuan untuk mengelola risiko bencana. Kesiapsiagaan bencana yang efektif melibatkan peran aktif masyarakat setempat sebagai bentuk komunikasi bencana (Aziz, 2023). Sehingga, pencegahan maupun penanggulangan bencana tidak hanya tugas dari badan maupun instansi terkait pada bidang mitigasi tetapi juga masyarakat sebagai komponen utama dalam pelaksana pembantu yang dapat memainkan peranannya dalam menjaga lingkungan sekitar. Hal ini juga disoroti oleh Yusuf dkk bahwa aktivitas masyarakat dalam mengolah lahan pertanian/perkebunan dengan menggunakan metode tebas-bakar (*slash and burn*) merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kebakaran hutan/lahan di Provinsi Riau dan tentu ini menjadi faktor utama karena potensi saat dilakukannya pembukaan lahan tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja. Berdasarkan analisis

distribusi titik panas, sebaran titik panas yang cukup tinggi ditemukan hingga jarak 20 km dari pertanian lahan kering. Semakin dekat jarak dari pertanian lahan kering maka semakin besar resiko terjadinya kebakaran mengingat kegiatan pembukaan lahan seringkali menggunakan api (Yusuf. Dkk, 2019).

Sejarah panjang penanggulangan bencana yang telah dilakukan oleh pihak pihak terkait pada bidang mitigasi bencana mengalami perubahan sedikitnya 4 paradigma sebagai acuan dalam melakukan suatu mitigasi bencana baik pra bencana maupun pasca bencana. Pertama, Paradigma Konvensional (*Relief & Emergency*) memfokuskan pada upaya penanggulangan bencana yang lebih terkonsentrasi dalam hal bantuan (*relief*) maupun kedaruratan (*emergency*). Sehingga, Paradigma Relief atau Bantuan Darurat berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan darurat berupa: pangan, penampungan darurat, kesehatan dan pengatasan krisis yang tujuan utamanya untuk menekan tingkat kerugian, kerusakan dan cepat memulihkan keadaan.

Kedua, Paradigma Mitigasi memfokuskan pada identifikasi daerah-daerah rawan bencana, mengenali pola-pola yang dapat menimbulkan kerawanan, dan melakukan berbagai macam kegiatan mitigasi yang bersifat struktural seperti membangun konstruksi maupun non-struktural seperti penataan ruang, *building code* dan lain sebagainya. Ketiga, Paradigma Pembangunan lebih menitik beratkan pada upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pengintegrasian upaya penanggulangan bencana dengan program pembangunan. Seperti melalui penguatan ekonomi, penerapan teknologi, pengentasan kemiskinan dan lain sebagainya.

Keempat, Paradigma Pengurangan Risiko yang memadukan sudut pandang teknis dan ilmiah sehingga dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan menekan risiko terjadinya bencana. Masyarakat dipandang sebagai subyek dan bukan obyek dari penanggulangan bencana serta diharapkan dapat aktif mengakses saluran informasi formal dan non-formal, sehingga upaya pengurangan risiko bencana secara langsung dapat melibatkan masyarakat. Pemerintah bertugas mempersiapkan sarana, prasarana dan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan pengurangan resiko bencana (Wibowo, 2010).

Paradigma yang telah sajikan di atas memberikan gambaran bahwa upaya mitigasi bencana terus mengalami perkembangan, baik itu secara pemikiran maupun *role model* (penerapan). Hal ini menghantarkan pada suatu pemikiran maupun asumsi dimana suatu upaya penanggulangan bencana yang terus dikembangkan sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan di lapangan akan tetapi model yang ada pada paradigma ini masih belum bisa untuk mereduksi maupun menanggulangi bencana secara optimal maupun signifikan. Di era keterbukaan informasi (era digital) seperti saat telah mendorong dunia ke arah revolusi industri 4.0 yang dicirikan oleh perpaduan teknologi yang mengaburkan batas antara fisik, digital, dan biologis. Hal ini ditandai dengan hadirnya sejumlah terobosan teknologi baru di sejumlah bidang tidak terkecuali dalam pemanfaatannya untuk mitigasi bencana, seperti diantaranya robotika, *blockchain*, dan yang tidak kalah penting adalah kecerdasan buatan (AI) untuk pengembangan model terbaru dalam penanggulangan bencana (Sawitri, 2019).

Satu catatan penting yang kemudian menjadi sorotan dimana masih minimnya keterlibatan maupun peran teknologi komunikasi dan informasi yang digunakan dalam pemanfaatan penanggulangan bencana, sebagaimana yang dikemukakan oleh Kurniawati. Melalui hasil risetnya, ditemukan bahwa dari 200 responden, sebanyak 157 responden menyatakan bahwasanya baik Lembaga Pemerintahan maupun Non-Pemerintahan tidak pernah melakukan sosialisasi mengenai mitigasi bencana dalam

bentuk apapun seperti baliho, spanduk tentang bencana, sampai datang *door to door* ke rumah warga dalam memberikan pemahaman tentang bencana juga tidak pernah didapatkan oleh warga sekitar daerah bencana.

Sistem peringatan bencana juga masih tradisional yaitu dengan melihat air pasang atau tidak dan berwarna keruh apa tidak. Mereka juga mengetahui datangnya bencana banjir dari hewan yang ada di sekitar seperti saat datang banjir, kecoa-kecoa akan menaiki dinding-dinding rumah mereka (Kurniawati, 2020). Jika dikaitkan pada konsep mitigasi bencana, maka segala bentuk potensi maupun kemungkinan dapat dijadikan suatu terobosan dalam rangka untuk mengurangi maupun mengantisipasi adanya peristiwa bencana. Sebagaimana definisi dari mitigasi yang mengemukakan adanya serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (BPBD, 2012). Artinya bahwa dalam pelaksanaan mitigasi bencana baik itu pada tahapan pra bencana maupun pasca bencana akan bersinggungan dengan aktifitas komunikasi demi terbentuknya kesadaran maupun penambahan wawasan yang terkait dengan kebencanaan.

Konsep ini kemudian memberikan suatu gambaran konkret terkait dengan instrumental yang digagas oleh William I. Gordon dimana fungsi komunikasi memiliki tujuan umum diantaranya seperti memberikan suatu informasi (*to inform*), memberikan suatu pengajaran atau pembelajaran (*to educate*) dan dapat mengubah suatu sikap maupun perilaku seseorang sebagaimana yang dikehendaki oleh orang yang memberikan pesan tersebut (*to change behavior*) serta dipergunakan untuk memberikan suatu hiburan (*to entertain*) (Rachmaniar & Susanti, 2022). Sehingga muncul suatu pemikiran dalam mitigasi bencana tidak hanya penerapan paradigma pengurangan resiko sebagai ujung tombak upaya yang bisa dilakukan, lebih dari itu ada pendekatan yang urgen untuk dilakukan salah satunya dengan penerapan model terbaru untuk merambah pada ranah komunikasi. Maka model penanggulangan bencana atau mitigasi bencana saat ini merujuk pada paradigma baru yakni paradigma teknologi komunikasi dan informasi dalam rangka mitigasi bencana. Penyusunan model komunikasi ini diharapkan dapat memberikan potensi strategis sebagai upaya dan langkah dimana Indonesia dapat melakukan penanggulangan bencana yang terorganisir pada level komunikasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Efektivitas Koordinasi Penanggulangan Bencana

Suatu kebencanaan memiliki skala pengukuran terbaik untuk memberikan gambaran konkret terkait kondisi dan juga situasi yang dihadapi pada suatu wilayah daerah. Mendapati realitas tersebut, hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Faisal Nomaini, dkk (2020) memotret adanya suatu keberhasilan yang didefinisikan dalam berbagai kategori. Efektivitas fungsi koordinasi sebagai variabel dilihat dalam empat dimensi, yaitu kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin. Setiap dimensi fungsi koordinasi memperoleh capaian efektivitas yang berbeda. Persentase pencapaian tertinggi ada pada dimensi kedisiplinan, sedangkan persentase pencapaian terendah ada pada pembagian kerja. Pada pengukuran kategori efektivitas diperoleh dua hasil dari kategori efektivitas yaitu dimensi kesatuan tindakan dan dimensi disiplin berada pada kategori efektivitas sedang sedangkan dimensi komunikasi dan dimensi pembagian kerja berada pada kategori efektivitas rendah (Nomaini, 2020). Hasil penelitian ini memberikan sinyal adanya suatu perkembangan penanggulangan bencana yang mengalami

optimalisasi yang berdampak pada adanya peningkatan penanggulangan bencana atau yang disebut dengan keefektifan manajemen penanggulangan bencana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana penelitian ini berfokus bagaimana mengkaji perspektif partisipan dengan berbagai macam strategi yang bersifat interaktif yang memiliki tujuan utama untuk menggambarkan dan mengungkapkan (*to describe and explore*) serta menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*) (Pujileksono dalam Aziz, 2022).

Metode kualitatif memiliki beragam cara dalam pengumpulan data yang digunakan untuk memenuhi informasi yang dibutuhkan selama proses penelitian. Penelitian ini menggunakan FGD (*Focus Group Discussion*) untuk membahas suatu realitas sosial yang khusus dengan berfokus pada objek kemudian berlanjut dengan analisis mendalam pada permasalahan yang dibahas melalui diskusi. Irwanto dalam (Pujileksono, 2015) menguraikan bahwasannya FGD cenderung memberikan variasi terhadap bagaimana upaya pembahasan yang dilakukan terkait mengkaji dari suatu permasalahan. Hal ini diperkuat oleh beberapa alasan fundamen yang membuat FGD menjadi suatu alternatif di dalam membongkar problematika sosial untuk bisa ditemukan kesimpulan maupun model sebagai upaya pengejawantahan dari solusi. Pertama, adanya keyakinan bahwa masalah yang diteliti tidak dapat dipahami dengan metode survei atau wawancara individu (Aziz, 2022). Dalam hal ini dikarenakan pembuatan *role model* untuk menciptakan suatu kebaruan dalam menghasilkan model baru pada komunikasi penanggulangan bencana membutuhkan adanya pembahasan lebih mendalam yang dalam hal ini melalui pendekatan desain *grounded theory* sebagai seperangkat prosedur yang digunakan untuk menyusun sebuah teori yang menjelaskan sebuah proses mengenai sebuah topik substantif (Egan, 2002). Penelitian kualitatif melalui pendekatan *grounded theory* cocok digunakan dalam rangka menjelaskan fenomena, proses atau merumuskan teori umum tentang sebuah fenomena yang tidak bisa dijelaskan dengan teori yang ada (Budiasih, 2014). Kedua, untuk memperoleh data kualitatif yang bermutu dalam waktu yang relatif singkat. Ketiga, sebagai metode yang dirasa cocok bagi permasalahan yang bersifat menyeluruh dan spesifik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Komunikasi dalam Tataran Manajemen Penanggulangan Bencana

Berbicara dinamika komunikasi akan terhubung pada suatu pemikiran yang diungkapkan oleh Little John (2009) yang menyampaikan bahwa komunikasi sangatlah luas sehingga tidak dapat diikat atau dibatasi dalam sebuah paradigma tunggal. Keterkaitan mitigasi bencana dengan komunikasi adalah adanya proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih dengan maksud untuk mengubah tingkah laku (Everett M. Rogers dalam Cangara, 2014). Dalam kajian komunikasi, dikenal dengan adanya istilah komunikasi persuasif dengan memberikan kenyamanan pada seseorang ketika melakukan suatu penerapan transfer pesan. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan Burgon & Huffner di tahun 2002 melalui penelitian Ira Mirawati terkait pemanfaatan teori komunikasi persuasif pada penelitian e-commerce di era digital. Proses komunikasi persuasif memberikan penjelasan bahwa didalamnya memiliki tujuan untuk mempengaruhi pemikiran dan pendapat orang lain agar sesuai dengan apa yang diinginkan komunikator atau sender (Putri, 2016). Persuasif bukan sekedar membujuk, merayu saja, tetapi persuasif merupakan suatu teknik mempengaruhi dan

mempergunakan serta memanfaatkan data dan fakta psikologi, sosiologi dari orang-orang yang kita pengaruhi (Nida, 2014). Artinya bahwa persuasif menginginkan penerimanya menerima persis dengan apa yang diinginkan maupun yang dikendaki oleh pengirim pesan, baik secara arit maupun maknanya. Lebih lanjut, istilah bujukan atau ajakan yang dikomunikasikan memiliki sifat ajakan terhadap suatu hal tanpa adanya paksaan. Hal ini memberikan suatu signal suatu kegiatan pertukaran pesan baik itu sebagai proses pemaknaan maupun tranfer data dilakukan dengan perasaan yang senang dan tidak ada tekanan dari pihak manapun atau lebih kepada membangun kesadaran diri (Mirawati, 2021). Perpaduan konsep inilah yang kemudian melahirkan suatu peranan penting komunikasi dalam membentuk maupun mewujudkan penanggulangan bencana. Seseorang diajak untuk bisa memahami pesan pesan kebencanaan untuk terlibat dalam pemikiran kongkret terkait mitigasi bencana seperti pada pemahaman literasi bencana maupun perencanaan pembangunan sebagai upaya pereduksian potensi bencana.

Literasi holistik menurut Aziz (2023) memiliki dimensi ruang lingkup yang luas. Artinya, literasi tidak ditafsirkan secara parsial atau membayangi suatu kepentingan vital dan mengingkari realitas yang ada. Literasi dapat mencakup suatu bentuk pembelajaran atau peningkatan pengetahuan yang kemudian memungkinkan untuk mencapai tujuan dalam konteks pribadi dan kelompok yang terkait dengan tanggap bencana. Selain itu, literasi dapat dijadikan sebagai sumber daya unggulan untuk mengembangkan keahlian atau meningkatkan keterampilan seseorang di bidangnya untuk dapat mengelaborasi upaya penanggulangan bencana. Sebagai wujud nyata dari literasi yang tidak kalah penting adalah upaya pihak-pihak terkait untuk dapat berpartisipasi dalam penanggulangan bencana. Kedua, opini atau pandangan (untuk mengubah pendapat) yang berubah selama ini, komunikasi bencana masih dianggap sebagai hal yang tidak darurat atau diberikan prioritas utama. Dalam kajiannya terhadap harian Kompas dan media online kompas.com, Asteria (2016) menemukan bahwa laporan bencana tidak memuat informasi bencana secara detail dan tepat. Alih-alih, bingkai berita berfokus pada aktivitas ekonomi dan ledakan pariwisata Raung. Aspek lain yang lebih penting untuk diprioritaskan adalah fungsi peringatan dini yang belum optimal. Hal ini sangat diantisipasi karena media dapat membantu kesiapsiagaan dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana alam (Alfarabi & Adhrianti, 2021) (Aziz, 2023). Sehingga sangat pantas apabila mitigasi bencana berpadu dengan model komunikasi. model komunikasi dalam pengelolaan maupun penanggulangan bencana akan menghasilkan literasi dikalangan masyarakat yang berdampak pada berkembangnya pola pikir masyarakat terkait bencana. Hal ini juga sebagai suatu solusi atas keresahan yang selama ini menjadi suatu fenomena bahwa masyarakat memaknai bencana tidak secara holistik dan prioritas. Bencana masih dianggap menjadi suatu hal yang wajar terutama kekonservatifan dalam melihat tanda tanda akan adanya bencana.

Meminjam pada konsep komunikasi sosial yang dikemukakan Brent D. Ruben (1975) memberikan suatu makna adanya proses yang mendasari sebuah fenomena atau gejala yang terjadi sebagai sebuah konsekuensi simbolisasi masyarakat dan pemanfaatan simbol serta difusi. Mitigasi bencana dinilai menjadi suatu fenomena yang harus dimaknai dengan cara pengambilan sikap untuk kemudian dapat diadopsi oleh masyarakat secara keseluruhan. Lebih lanjut Oteng Sutisna memberikan pandangan bahwa komunikasi sosial diperuntukkan untuk mengubah perilaku. Komunikasi sosial adalah suatu proses interaksi antara orang-orang atau kelompok sikap dan memiliki tujuan dalam rangka saling memengaruhi perilaku perorangan (individu) maupun kelompok (Sutisna, 1989). Berkaitan dengan hal tersebut, secara komprehensif dan

holistik peran komunikasi untuk mengejawantahkan penanggulangan bencana, sedikitnya terdapat 3 aspek penting sebagai tolak ukur maupun pedoman (Mashud, 2019).

1. *Sebagai pemberi informasi* Informasi perlu disampaikan kepada warga masyarakat karena kenyataan menunjukkan sebagai berikut.
 - a. Manusia hanya dapat maju dan berkembang apabila dia mengetahui nilai-nilai yang perlu dicapai. Kearifan lokal (*local wisdom*) merupakan salah satu perspektif yang dapat dikembangkan oleh pemerintah dalam hal mitigasi bencana. Hal ini dapat dipahami sebagai sejumlah gagasan, nilai-nilai, pandangan-pandangan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal dapat digunakan untuk mengurangi resiko bencana gempa bumi (Angin & Sunimbar, 2016). Dengan demikian pemerintah dapat mengendalikan dan juga mengarahkan masyarakat sesuai dengan budaya yang ada pada lingkungan tersebut.
 - b. Alasan utama suatu informasi harus tersampaikan kepada masyarakat bahwa tidak semua orang memiliki pengetahuan yang sama mengenai nilai nilai yang sudah berhasil dicapai, mengenai sarana-sarana yang harus dipakai, dan bahaya-bahaya yang harus dihindari. Contoh konkret sebagaimana yang telah dibuktikan melalui hasil penelitian terkait literasi digital *smartphone* sebagai informasi bencana longsor warga di Kelurahan Candi, Kecamatan Candisari Kota Semarang. Fakta ini menunjukkan bahwa Kapasitas yang dimiliki warga mengenai kompetensi literasi digital berada pada kategori “sedang” 50% berdasarkan jumlah persentase bahwa masih terdapat beberapa warga yang tidak memanfaatkan media digital khususnya media elektronik *smartphone* sebagai sarana informasi tambahan (Noviantika, 2020). Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa tidak ada jaminan masyarakat memiliki informasi yang cukup terkait penanggulangan bencana jika tidak ada suatu tindakan maupun pendekatan langsung oleh pihak pemerintah. Masyarakat perkotaan yang selama ini dinilai sebagai kumpulan orang-orang yang terdidik tidak selamanya benar dan merupakan bentuk dari stereotipe mayoritas orang. Jika hal ini diasumsikan sebagai pengukuran wawasan masyarakat, maka masyarakat belum memperoleh literasi secara optimal dikarenakan penggunaan instrumen yang tidak bisa dieksplorasi lebih jauh.
 - c. Kenyataan terakhir terkait informasi harus segera disampaikan kepada masyarakat karena pada dasarnya setiap orang mempunyai hak untuk mendapat informasi yang berguna bagi hidupnya. Analogi sederhana pada setiap individu (seseorang) tercukupinya kebutuhan hidup atas dua macam yakni kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Ketidakcukupan dari salah satu yang akan membuat seseorang seimbang dalam menjalani hidupnya akan berdampak pada ketimpangan atau kekekurangan wawasan dan bahkan dapat berdampak buruk bagi keseimbangan kehidupan seseorang tersebut. Oleh karena itu sangat penting seseorang untuk memperoleh informasi yang memang peruntukannya untuk masyarakat secara luas terutama dalam konteks mitigasi bencana yang menyangkut keselamatan dan keamanan dari setiap jiwa.
2. *Sebagai pemberi bimbingan*, baik secara langsung maupun tidak langsung. Konsep komunikasi sosial menemukan pada suatu polarisasi bahwa komunikasi memiliki peranan pentingnya dalam merubah sikap, menciptakan suatu perilaku maupun mempertahankan kebiasaan. Melalui proses pembimbingan yang berkelanjutan, pelatihan dengan berkala masyarakat mampu dijadikan sebagaimana yang diinginkan

oleh pemerintah. Fakta ini merupakan hasil elaborasi yang dapat dimainkan oleh pemerintah maupun instansi terkait dalam kaitannya untuk membentuk jiwa kesiapan siagaan untuk menanggulangi bencana. Keterlibatan maupun peran aktif masyarakat menjadikan pengelolaan pengurangan bencana cepat terwujud. Sebagai komponen pendukung, media harus berperan aktif didalam menjalankan fungsinya sebagaimana yang ada pada tugas pokok dan fungsi media massa yaitu fungsi sebagai edukasi. Suatu penelitian terapan dilakukan untuk mengukur eskalasi masyarakat dalam memaknai maupun memahami arti penting upaya upaya penanggulangan bencana. Servei membuktikan dari hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Ciamis menunjukkan adanya peningkatan skor rerata pengetahuan dari 77,07 sebelum pelatihan ke 89,57 setelah pelatihan, serta sikap positif yang ditunjukkan oleh peserta pelatihan seperti para kader kesehatan, aparatur pemerintahan desa, anggota perlindungan masyarakat (linmas), perwakilan puskesmas, unsur kewilayahaan seperti RT, RW, dan Dusun (Ibrahim, 2020). Pemerintah sebagai pengelola masyarakat, yang berkolaborasi dengan pihak pihak terkait secara berkala harus memberikan suatu perkembangan yang diwujudkan dengan pelatihan baik fisik maupun non fisik demi terciptanya kemandirian masyarakat dalam melakukan penanggulangan bencana.

3. *Sebagai pemberi hiburan*, secara tidak langsung komunikasi sosial telah memberikan alternatif solusi dalam permasalahan penanggulangan bencana. Berbicara bencana alam, akan sangat erat kaitannya dengan pembahasan seberapa besar kerugian yang ditimbulkan dan juga seberapa banyak korban akibat terjadinya peristiwa bencana tersebut.



Gambar 1. Infografis Peristiwa Bencana Indonesia (Periode 1 Januari 2023 – 9 Mei 2023)

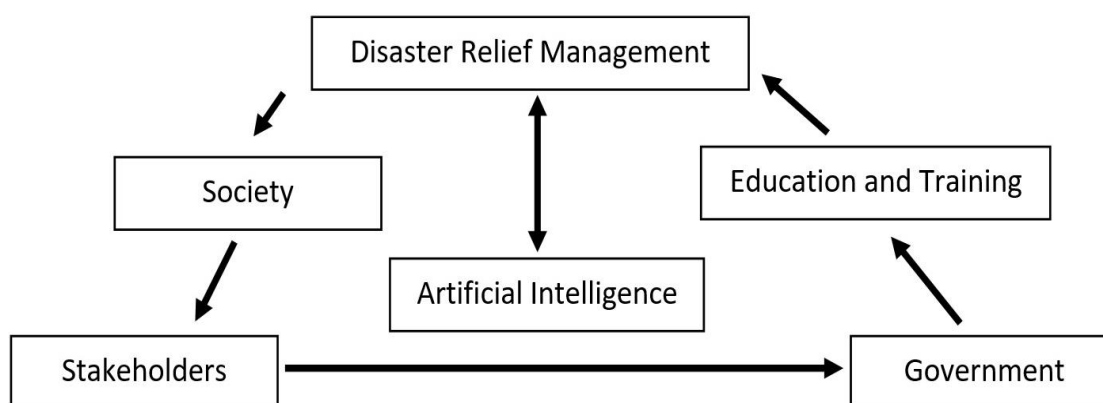
Sumber: Geoportal Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) (Infografis Tahunan Bencana di Indonesia)

Terdapat beberapa spesifikasi dampak bencana alam yang ditimbulkan, mulai dari meninggal dunia, hilang, menderita dan mengungsi maupun luka luka. Hal ini merupakan dampak fisik yang tidak bisa dihindari ketika terjadi adanya peristiwa bencana. Tentu akan membawa dampak psikologi ketika berbicara pada korban meinggal dunia maupun yang hilang. Pihak keluarga akan merasa kehilangan atas musibah yang menyimpannya

walaupun secara kasat mata tidak hanya dari keluarga yang meninggal saja yang merasa sedih tetapi seluruh korban jiwa yang ada pada lingkaran bencana tersebut turut serta dalam kesedihan. Fenomena ini kemudian yang tidak bisa disembuhkan melalui jalur medis dan apapun. Akan tetapi dengan menerapkan pada solusi yang telah ditawarkan oleh komunikasi sosial orang satu dengan orang yang lainnya dapat memankan peran untuk saling menghibur. Lebih utamanya adalah pihak terkait maupun pemerintah sebagai penanggung jawab utama untuk memberikan hiburan sebagaimana pada konsep komunikasi sosial. Lebih lanjut penjelasan tersebut dapat terlihat pada gambar berikut:

Model Komunikasi Sebagai Solusi Mitigasi Bencana

Perencanaan model komunikasi bencana dalam paradigma modern harus selalu melibatkan peran teknologi didalamnya. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan penduduk yang sanget pesat berkembang dan juga tidak bisa dipungkiri segala aspek kegiatan sosial kemasyarakatan telah banyak menggunakan dan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi. Oleh sebab itu, penanggulangan bencana dalam paradigma modern muncul dengan menghadirkan peranan penting teknologi untuk membantu memberikan suatu sinyal yang dapat membantu masyarakat mewujudkan pengelolaan mitigasi bencana. Berikut adalah model komunikasi yang dapat dijadikan suatu penerapan di kalangan kehidupan sosial baik diterapkan oleh instansi terkait penanggulangan bencana maupun masyarakat pada umumnya.



Gambar 2. Model Komunikasi Manajemen Penanggulangan Bencana
Sumber: Olahan Peneliti dan Hasil Diskusi FGD

Berikut penjelasan Model Komunikasi di atas:

1. Masyarakat

Secara yuridis, masyarakat berhak dan bahkan wajib dalam rangka penanggulangan bencana. Hal ini sebagaimana yang ada di atur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Perka BNPB No. 11/2014). Kewajiban masyarakat dalam menjaga stabilitas lingkungan untuk mewujudkan penanggulangan bencana, diantaranya seperti 1) Menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup; 2) Melakukan kegiatan penanggulangan bencana; 3) Memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana. Dengan demikian, seluruh komponen masyarakat terlibat aktif untuk ikut serta berada

dalam lingkaran jaringan komunikasi penanggulangan bencana, mulai dari tingkat RT, RW, Desa, Kecamatan hingga sampai pada level kota dan provinsi.

2. *Stakeholder*

Yakni adalah penunjang kehidupan masyarakat maupun pemerintah, bidang industri, bidang media dan lain sebagainya. Komponen *stakeholder* dituntut juga berperan aktif dalam penanggulangan bencana khususnya pada bidang media massa. Keterlibatan media massa akan dapat berpengaruh besar terhadap keberhasilan penanggulangan bencana. Tentu di dalamnya harus dilandasi atas dasar kejujuran dan integritas yang tinggi karena demi kepentingan besama dan meninggalkan kepentingan golongan yang akan berdampak pada independensi penyebaran suatu informasi.

3. Pemerintah

Menjadi tokoh utama dalam pengelolaan masyarakat sehingga dapat menghasilkan masyarakat yang tanggap serta siap untuk penanggulangan bencana. Melalui Peraturan Menteri sosial RI nomor 29 tahun 2012, pemetintah membentuk satuan yang sebut dengan Taruna Siaga bencana (TAGANA). Taruna Siaga Bencana ini merepresentasikan sebagai relawan sosial yang ditetapkan dan dibentuk serta diawasi oleh pemerintah untuk membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam melaksanakan penanggulangan bencana baik pada saat prabencana, saat tanggap darurat maupun saat pasca bencana serta tugas-tugas penanganan permasalahan sosial lainnya yang terkait dengan penanggulangan bencana (Yuliani, 2020). Tentu solusi ini bukan merupakan optimalisasi upaya pemerintah karena tidak bisa dihindari bahwa kenyataan seiring sengan perkembangan zaman dan teknologi, TAGANA dapat digantikan dengan peranan teknologi. Sehingga pemerintah harus lebih mengembangkan upaya penanggulngan bencana dengan teknologi. Seperti contohnya membangun suatu sistem pra bencana yang disambungkan dengan satelit dan dapat terintegrasi pada seluruh rumah penduduk yang berada pada areal potensi bencana. Sehingga istilah mencegah lebih baik daripada mengobati dapat diwujudkan dan berimplikasi positif dengan dampak yang ditimbulkan utamanya korban jiwa.

4. Pendidikan dan pelatihan

Jika dianalogikan dalam suatu organ manusia, pendidikan dan pelatihan diibaratkan dengan jantung dan otak dari struktur organ tubuh manusia. Seseorang dapat menemui suatu solusi atas permasalahan jika terdapat ilmu yang bisa memberikan solusi atas permsalahan tersebut. Melalui pendidikan dan pelatihan, masyarakat akan dipandu untuk mengetahui, *upgrade* wawasan maupun melakukan suatu penerapan keilmuan yang utamanya hal yang harus diambil atau dilakukan ketika akan menghadapi suatu bencana maupun dihadapkan pada saat bencana tersebut terjadi. Diharapkan pelatihan yang dilakukan secara keberlanjutan menghasilkan kemandirian masyarakat siap siaga terhadap bencana maupun untuk mengembangkan upaya penanggulangan bencana.

5. Kecerdasan buatan

Pada bagian ini merupakan pengitegrasian diantara 4 komponen model komunikasi, mulai dari masyarakat, *stakeholder*, pemerintah, dan pendidikan pelatihan. Saat ini seluruh aspek kehidupan sosial dihadapkan pasa kenyataan terikatnya peran dan fungsi manusia terhadap penggunaan teknologi komunikasi dan infromasi. Oleh karena itu, tidak bisa dihindari perkembangan pananggulangan bencana atau mitigasi harus

terintegrasi dengan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan dianggap sebagai ‘pembantu’ bagi manusia untuk lebih bisa mengeksplorasi diri, dalam konteks mitigasi bencana kecerdasan buatan dapat menunjukkan bagaimana potensi terjadinya bencana. Seperti pada sinyal adanya tsunami yang dipasangan di daerah lepas pantai yang berpotensi mengalami angin pada saat kondisi lautan sedang pasang. Kecerdasan buatan utamanya didesain untuk memprediksi datangnya atau akan munculnya suatu peristiwa bencana. Dengan demikian, penambahan peran kecerdasan buatan ini disegala potensi kerawanan akan menghasilkan optimalnya pereduksian terjadinya korban yang disebabkan peristiwa bencana karena dapat memprediksi terjadinya bencana di beberapa hari sebelum terjadinya bencana. Pemasangan alat alat kecerdasan buatan sangat cocok ditempatkan di daerah lawan, longsor, rawan banjir, rawan angin, dan juga rawan gempa dengan diintegrasikan pada alat komunikasi yang dipasangkan disetiap rumah penduduk sekitar. Sehingga pada saat alat tersebut sudah mengeluarkan sinyal kedaruratan yang muncul pada beberapa hari sebelum terjadinya, maka seluruh penduduk sekitar harus mengungsi sementara dari daerah tersebut.

SIMPULAN

Penanggulangan bencana memberikan suatu integrasi holistik yang dapat diterapkan pada model komunikasi. mendasar pada pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diambil suatu kesimpulan yang menjawab tujuan utama pada penelitian ini, yaitu peran komunikasi dalam tataran manajemen penanggulangan bencana dapat dilakukan dengan menerapkan konsep persuasif yang di dalamnya terdapat penerapan komunikasi sosial. Komunikasi sosial inilah yang kemudian menjadi suatu tolak ukur dan pedoman dalam mengambil sikap dalam memainkan peran komunikasi untuk mitigasi bencana, yaitu sebagai pemberi informasi, pemberi bimbingan, serta untuk memberikan suatu hiburan. Model komunikasi sebagai Solusi Mitigasi Bencana memberikan fakta bahwa keberhasilan penanggulangan bencana haruslah mengintegrasikan semua komponen sosial kemasyarakatan dan juga melibatkan unsur teknologi komunikasi dan informasi yang dijawantahkan sebagai wujud kecerdasan buatan. Keseluruhan komponen tersebut saling terintegrasi satu dengan yang lainnya. Ketika akan melakukan suatu pengembangan penanggulangan bencana akan cepat terlaksana dan juga dapat memperbesar kemungkinan terantisipasi potensi bencana yang diintegrasikan dengan kecerdasan buatan.

REFERENSI

- Afni, Z; Triono, D. H; Amelia, V. 2022. Kebijakan Perlindungan Ekosistem Gambut Di Indonesia: Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Pasca 2015. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 19(2), Hal. 71-84
- Angin, I.S. & Sunimbar (2016). Mitigasi bencana gempa bumi berbasis kearifan lokal masyarakat Tanaai, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Geografi FKIP UMP*. 99- 104.
- Annur, Cindy Mutia. 2023. Ada 749 Kejadian Bencana Alam di Indonesia hingga Akhir Maret 2023, Banjir Terbanyak. Akses 15 Mei 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/04/03/ada-749-kejadian-bencana-alam-di-indonesia-hingga-akhir-maret-2023-banjir-terbanyak>
- Aziz, M. H. 2022. *Komunikasi Terapeutik: Penyembuhan Dan Pemulihan Korban Pelecehan Seksual (Fenomena Pelecehan Seksual Dunia Pendidikan Di Indonesia)*.

- Prosiding Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat UPNVJ 2022, 3(2), 235-258.
<https://conference.upnvj.ac.id/index.php/semnashmkm2020/article/view/2324/pdf>
- Aziz, M. H. 2023. Komunikasi Kebencanaan: Peran dan Manfaat Pada Mitigasi. *Communications*, 5(1), 301-316
- BPBD. Pengertian Mitigasi Bencana. Diakses pada September 9, 2019, dari <http://bpbd.karanganyarkab.go.id/?cat=17>
- Brent D. Ruben & John Y. Kim. 1975. *General Systems Theory and Human Communication*. Rochelle Park, N. J.: Hayden Book Company.
- Budiasih, I Gusti Ayu Nyoman 2014. Metode Grounded Theory Dalam Riset Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 9(1), 19-27.
- Cangara, Hafied. 2014. *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*. Ed.Revisi Cet.2. Jakarta: Rajawali Pers.
- Egan, T. Marshall. 2002. *Grounded Theory Research and Theory Building*. *Advances in Developing Human Resources*, Vol. 4, No.3. SAGE Publications.
- Geoportal Data Bencana Indonesia,. 2023. Infografis Tahunan Bencana di Indonesia. Akses 15 Mei 2023. <https://gis.bnpb.go.id/>
- Ibrahim, Kusman; Emaliyawati, Etika; Yani, Desy Indra; Nursiswati. 2020. Pelatihan dan Simulasi Penanggulangan Bencana Bagi Masyarakat. *Media Karya Kesehatan*: 3(1), p.27-38.
- Littlejohn, Stephen W & Karen A. Foss.2009. *Teori Komunikasi*, edisi 9. Jakarta: Salemba Humanika
- Mashud, Mustain. 2019. *Sosiologi Komunikasi*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Mirawati, Ira. 2021. Pemanfaatan Teori Komunikasi Persuasif Pada Penelitian E-Commerce Di Era Digital. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau*, 9(1), p. 58-80
- Nomaini, F., Thamrin, M. H., & Budiarto, G. 2020. The Effectiveness of Coordination on Disaster Management By the Goverment Disaster Agency in Ogan Ilir Regency. *Sumatra Journal of Disaster, Geography and Geography Education*, 4(2), 196-203.
- Noviantika,. 2020. *Kapasitas Literasi Digital Smartphone Sebagai Informasi Bencana Longsor Warga Di Kelurahan Candi Kecamatan Candisari Kota Semarang*. **Skripsi**. Diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang: Semarang.
- Rachmaniar & Susanti, Santi. 2022. Komunikasi Instrumental Ibu Dan Anak Dalam Kegiatan Penyapihan ASI. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 12(1), p. 61-74.
- Sawitri, Dara. 2019. Revolusi Industri 4.0 : Big Data Menjawab Tantangan Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Ilmiah Maksitek*, 4(3), p. 1-9
- Sutisna, Oteng. 1983. *Administrasi Pendidikan Dasar* Teoritis untuk Praktek dan Profesional. Bandung: Angkasa.
- Sutrisno, Eko; Hardhinasty, Rozi. 2019. Dalkarhutla : Upaya dan Legitimasi. Akses 15 Mei 2023. <https://bpsilhk-kuok.org/dalkarhutla-upaya-dan-legitimasi/>
- Wibowo, Mardi. 2010. Strategi Mitigasi Untuk Mengatasi Penyakit Akibat Sanitasi Lingkungan Yang Buruk : Paradigma Baru Mitigasi Bencana. *JRL*, 6(3). P. 207-214.
- Yuliani, Novia; Irawan, Bambang; Prakoso, Cathas Teguh. 2020. Peranan Taruna Siaga Bencana Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Samarinda. *Journal Administrasi Publik*, 8(1), p. 9018-9029.
- Yusuf, A; Hapsoh; Siregar, S. H; Nurrochmat, D. R. 2019. Analisis Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau. *Dinamika Lingkungan Indonesia*, 6(2), p 67-84.